LAPORAN

MONITORING HASIL PENGUKURAN KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2025

TRIWULAN IV

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan IV Tahun 2025 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil evaluasi internal Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar penyajianya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Benteng, 5 Januari 2026

Kepala Dinas PMPTSP,

Hj. ANDI ROS IRMA,S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19701001 199203 2 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP 1

BAB II EVALUASI
A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan 7
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran 10
C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
A. Permasalahan 14
B. Rekomendasi 14

BAB IV PENUTUP
Penutup 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laoporan Kinerja serta Permen PAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertangungjawabkan keberhasilan/kegagalan** pelaksanaan **program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik.**

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025;
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan kedepannya.

C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

1. Peringkat : B

2. Alamat : Jalan Jend Ahmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP)Benteng Kab.Kepulauan Selayar
3. Email : dpmptsp.selayar@gmail.com
4. Titik koordinat : **S** 6,11924, **E** 120,467141
5. Foto kantor

Gambar 1.1



1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijkasanaan perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas;

e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

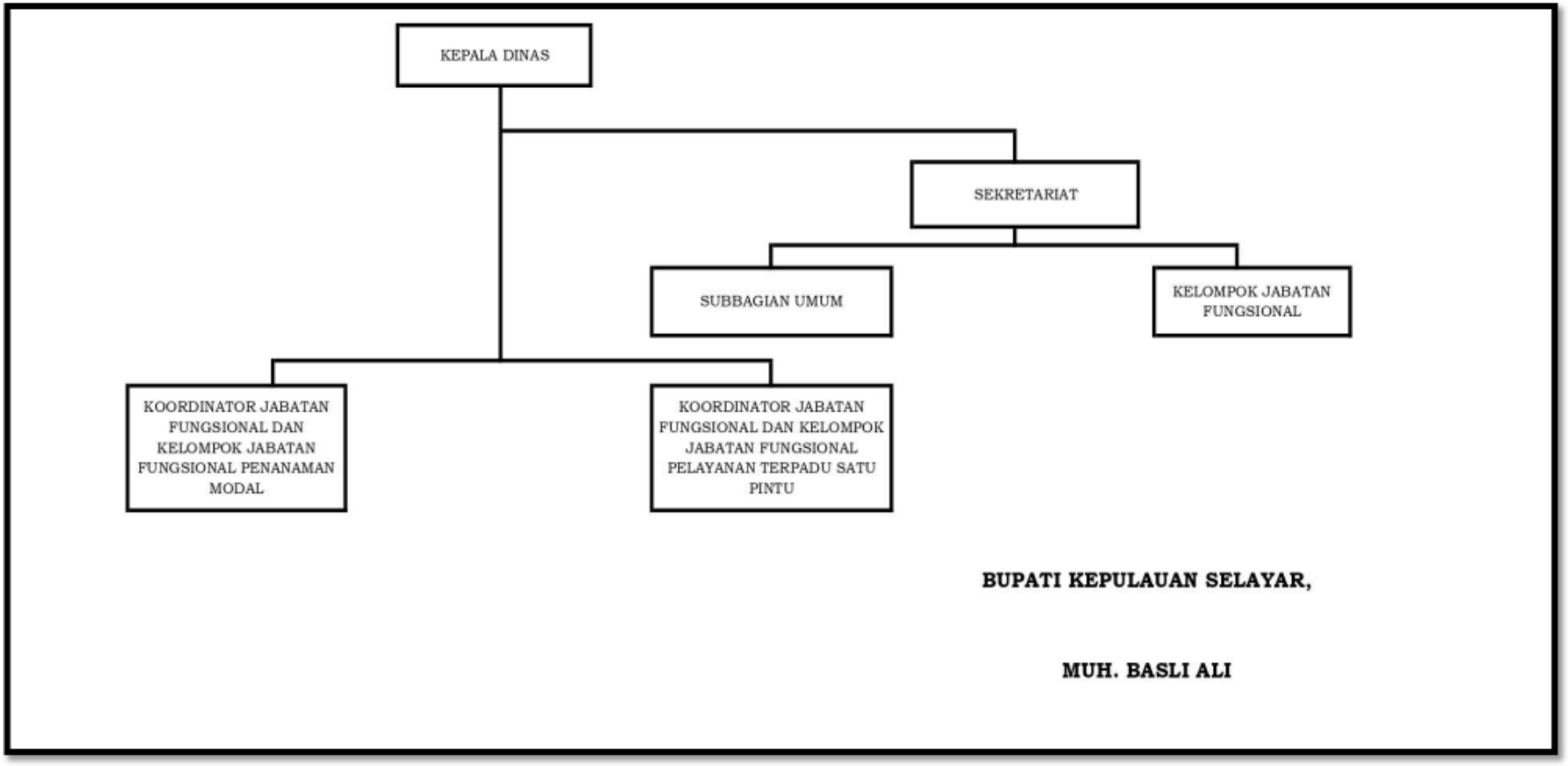
a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
h. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
   - Subbagian Umum
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Jumlah Pemangku Jabatan Struktural = 3 Pegawai

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu = 12 Pegawai

Jumlah Pegawai Fungsional Pelaksana = 8 Pegawai

Jumlah Pegawai PPPK = 2 Pegawai

Jumlah Pegawai PPPK Paruh Waktu = 13 Pegawai

Jumlah Jabatan yang Belum Terisi = 43 Pegawai

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1

Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon Per 31 Desember 2025

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai PPPK	Pegawai PPPK PW
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	3	-	5	-	1	1	3	5	-	-
2	Strata Satu (S1)	3	9	-	12	1	-	-	11	12	2	10
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	-	3	2	5	-	-	-	5	5	-	3
Jumlah		5	16	2	23	1	1	1	20	23	2	13

Sumber data : Subag. Umum, Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Desember Tahun 2025

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II
E V A L U A S I

A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Capaian Kinerja (%)**	71,51%	67,354 %	
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	91,00%	92,44%	
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2 Dok	100 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 dok	100%
	4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan	1 laporan	2 laporan	100 %

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100 %
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun	100 %	100%	100%
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	100%
	2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	100 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersedia	-	-	-
	4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 dok	12 dok	100 %
	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerag SKPD yang disusun dan dilaporakan	2 Dok	2 Dok	100 %
	2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok	100 %
	3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok	100 %
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %
	2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 laporan	79 laporan	100 %
	e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia	100%	100%	10**0**%
	1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	-	-	-
	2) Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-
	3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	17 Unit	17 Unit	10**0**%
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik, dan air yang tersedia	3 laporan	3 laporan	100 %
	2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 laporan	3 laporan	100%

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
	2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	25 Jenis	17 unit	68%
	3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	10 unit	100%
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	32 Perusahaan	23 investor	71,88%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	2 kegiatan	1 kegiatan	100 %
	1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dok	3 Dok	300%
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	74.500	92.165	123,71%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	74.500	92.165	123,71%
	1) Penyelesian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelau usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	100%
	2) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	20 pelaku usaha	100%
	3) Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 Pelaku Usaha	101 kegiatan usaha	1262,5%
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	70%	70%	70%
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	20 perusahaan	-	-
	1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dok	2 dokumen	100%
	2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian	-	-	-

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	Penanaman Modal	fasilitas/insentif yang tersedia			
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	100%	100%
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	1600 izin	1315 Izin	82,19%
	1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang MendapatkanPelayanan Terpadu Perizinan dan Non PerizinanBerbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	1500 izin (Pelaku Usaha)	1315 Izin	87,67%
	2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerizinan Berusaha dan Non Perizinan	6 Kegiatan Usaha)	43 Kegiatan Usaha	716,67%
	3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1500 pelaku usaha	267 pelaku usaha	17,8%
	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	100%	100%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	100%	100%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yangDiolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 mencapai 67,34% atau rata-rata ***sangat baik*** meskipun masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2025 sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.675.160.155	3.424.248.876	93,17%
		a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.473.300	17.122.880,-	87,92%
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2,949,690	98,32 %
		2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.000.000	2,970,760	99,03 %
		3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.967.800	2,818,270	94,96 %
		4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	2,674,600	2,463,850	92,12 %
		5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,956,100	2,826,120	94,96%
		6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,851,300	1,819,910	98,30%
		7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.023.500	1.893.780.	93,59 %
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.767.545.155	2.551.847.909	92,21%
		1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.767.545.155	2,547,046,809	92,03%
		2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2,734,850	91,16%
		3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	-	-	-
		4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.313.000	2,066,250	89,33%
		c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	8.933.300	8.436.050	94,43%%
		1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1,322,800	1,176,600	88,95 %
		2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5,000,000	4,859,800	97,20 %
		3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2,610,500	2,399,650	91,92 %
		d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.239.500	170.247.377	96,05%
		1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,821,500	9.821.500	100%
		2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,620,000	7.400.000	97,11%
		3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	159,798,000	159,685,877	99,83 %
		e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.675.000	152.386.800	91,97%
		1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	-		
		2) Pengadaan mebel	-		
		3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	165.675.000	152.386.800	91,97%
		f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.833.900	389.542.063	95,28%
		1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	108.198.000	92.504.968	85,50%

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*
		2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	300,635,900	297.001.095	98,79%
		g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.460.000	127.422.297	99,19%
		1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	44,630,000	43.942.110.	98,46%
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	41,420,000	41.420.000.	100%
		3) Pemeliharaan/rehanilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10,450,000	10,432,000	99,83%
		4) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan	31,960,000	31.628.187	98,96%
2.	Urusan Penanaman Modal	3. Program Promosi Penanaman Modal	121.723.945	80.212.700.	65,90%
		Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	121.723.945	80.212.700.	65,90%
		1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	121.723.945	80.212.700.	65,90%
		4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	129.740.300	124.480.032	95,94%
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	129.740.300	124.480.032	95,94%
		1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5,542,000	3.554.881	64,14 %
		2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	50,234,000	48,947,063	97,44 %
		3) Pengawasan Penanaman Modal	73,964,300	73.545.850	99,43 %
		5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.601.000	-	-
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	4.601.000	-	-
		1) penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.601.000	-	-
		6. Program Pelayanan Penanaman Modal	75.929.100	73.870.780	97,28 %
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.929.100	73.870.780	97,28 %
		1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	47,819,100	45.760.780	95,70%
		2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	5,700,000	5,700,000	100%
		3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	22,410,000	22,410,000	100%
		4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*
		7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	14.980.000	13.662.664	91,20 %
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.980.000	13.662.664	91,20%
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	14.980.000	13.662.664	91,20%

Realisasi anggaran Triwulan IV sebesar Rp. **3.718.042.814,**,- dari Jumlah anggaran Tahun 2025 setelah perubahan senilai Rp. **4.022.134.500**,- sehingga Persentase rata-rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan IV tahun 2025 sebesar **92,44%.**

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan IV tahun 2025 Sesuai tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2025	Realisasi	Persentase Capaian 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*			
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	75,00 (BB)	75,74	108,2
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	75,00 (BB)	67,35 (B)	89,80
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	80,00%	89,55	111,93
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2,50 %	223,81	8.952,40
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12,00%	14,19	118,25
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	20,00%	203,47	1.017,35
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	8,00%	700,89	8.761,12
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	88,00%	89,95	101,76

BAB III
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Serapan anggaran Dinas PMPTSP sudah terbilang Tinggi yaitu 92,44% meskipun ada kegiatan yang belum terealisasi 100% yang disebabkan oleh mekanisme penggunaan aplikasi perencanaan SIPD dan Belanja ATK melalui aplikasi E-Katalog tidak sema harganya dengan anggaran yang di keluarkan di sipd sehingga banyak anggaran yang tidak terealisasi 100%.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindak lanjut untuk menghadapi masalah di atas adalah :

1. Perlunya peningkatan terkait penerapan aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalog sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik.
2. Perlu adanya kepastian anggaran taktis bagi pemerintah daerah di awal tahun sehingga tidak terjadi refocusing anggaran pada pertengahan tahun.

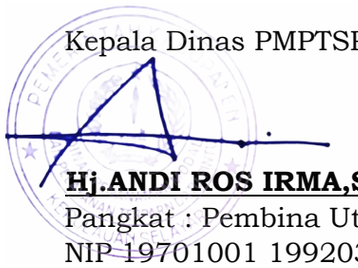
BAB IV

P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan/subkegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi di susun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada tahun berikutnya, terima kasih.

Benteng, 5 Januari 2026

Kepala Dinas PMPTSP,



Hj.ANDI ROS IRMA,S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19701001 199203 2 013